



**STRATEGI PEMERATAAN DALAM KESESUAIAN PENERIMA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN DADAPREJO KOTA BATU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh:

**FERDYLA FRISCA PRASETYANINGTYAS**

NPM.201.09.1.0004



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

Ferdyla Frisca Prasetyaningtyas, 2023. NPM 21901091044, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Strategi Pemerataan Dalam Kesesuaian Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Dadaprejo. Dosen Pembimbing 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin., M.Si, Dosen Pembimbing II : Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int .

---

Kesesuaian penerima Bantuan Langsung Tunai pada Kelurahan Dadaprejo memiliki tingkat kesesuaian sangat tinggi dibandingkan Desa yang lain di Kecamatan Junrejo. Hal yang mempengaruhi tingkat kesesuaian yang tinggi pada Kelurahan Dadaprejo. Hal tersebut perlu kita cari tau strategi apa saja yang dilakukan oleh Kelurahan Dadaprejo untuk mencapai tingkat kesesuaian penerima bantuan yang tinggi atau tingkat ketidakesesuaian yang rendah. Dari permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi pemerataan dan kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerataan,

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang ada di Dadaprejo ini sangat rendah dikarenakan strategi dari pemerintah dalam mengatasinya yaitu bekerjasama dengan LPMK, karang taruna dan R/RW untuk penyesuaian data sehingga bantuan langsung tunai bisa langsung diterima oleh pihak berwenang dan tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian bantuan.

**Kata Kunci : Strategi, Pemerataan, Bantuan Langsung Tunai**



## SUMMARY

Ferdyla Frisca Prasetyaningtyas, 2023. NPM 21901091044, Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang. Equity Strategy in the Suitability of Direct Cash Assistance Recipients in Dadaprejo Village. Supervisor 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Supervisor II: Hirshi Anadza, S.Hub.Int, M.Hub.Int.

---

The suitability of Direct Cash Transfer recipients in Dadaprejo Village has a very high level of suitability compared to other villages in Kecamatan Junrejo. Things that influence the high level of suitability in Kelurahan Dadaprejo. It is necessary for us to find out what strategies are carried out by Dadaprejo Village to achieve a high level of conformity of aid recipients or a low level of non-conformity. From these problems the author formulates the problem as follows: How is the strategy of equalization and suitability of direct cash assistance recipients in Dadaprejo Village? The purpose of this research is to find out the equalization strategy in the suitability.

The method in this research is to use a qualitative approach and descriptive research type. In collecting data, interviews, observation, and documentation techniques were used. And data analysis in this study uses three components of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that poverty in Dadaprejo is very low because the strategy of the government in overcoming it is to collaborate with LPMK, youth organizations and R / RW for data adjustment so that direct cash assistance can be directly received by the authorities and there is no delay in providing assistance. With the strategy implemented by the Dadaprejo Village, it can be said that it makes it easier and faster to provide assistance.

**Keywords: Strategy, Equalization, Direct Cash Assistance**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota Batu merupakan kota dataran tinggi dengan masyarakat bermata pencaharian utama di bidang pariwisata dan pertanian. Kota Batu memiliki jumlah penduduk 97,502 orang terdiri dari masyarakat produktif, masyarakat lansia dan masyarakat non-produktif sehingga kota batu belum memiliki pendapatan kota dengan jumlah besar dan masyarakat juga membutuhkan pemberian bantuan dari pemerintah kota (Hanifah Norma Sumatra,2020).

Berdasarkan pada verifikasi atau pemeriksaan kebenaran yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 Penerima bantuan langsung tunai pada setiap kecamatan terdapat 2.152 orang pada Kecamatan Batu, 1.842 pada Kecamatan Bumiaji dan sebanyak 1.991 orang mendapatkan bantuan langsung tunai pada Kecamatan Junrejo. Berdasarkan survei dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kecamatan dimana orang tersebut sebagai penyalur atau pengecek pemberian bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mana salah satu tugasnya memberikan dan pengecekan penerima bantuan. Pada Kecamatan Batu terdapat 16% penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan, pada Kecamatan Bumiaji terdapat kurang lebih 19% penerima bantuan langsung tunai yang tidak sesuai pada sasaran, sedangkan pada

Kecamatan Junrejo terdapat 12% penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung tunai. Hasil data tersebut berdasarkan dari Lembaga Pemberdaya Masyarakat tingkat Kecamatan, pada setiap kecamatan di Kota Batu (Dinas Sosial Kota Batu,2021).

"Pada program bantuan langsung tunai terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penerimaan pada kecamatan Batu masih ada beberapa kesalahan penerima jika ditinjau secara langsung." (Wawancara pada 3 Januari 2023)

"Kesesuaian pada saat ini memang cukup sedikit sulit karena memang banyak data yang masih tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan faktor pengenalan antara saudara dengan pihak yang mendata sehingga banyak yang menerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria masyarakat miskin" (Wawancara pada 3 Januari 2023)

"Setiap daerah atau kelurahan memiliki cara sendiri agar penerima bantuan bisa diterima sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat karena banyak masyarakat yang dianggap butuh tidak mendapatkan bantuan dan masyarakat dianggap tidak butuh mendapatkan bantuan. Namun, secara maksimal pemerintah daerah melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ada" (Wawancara pada 5 Januari 2023)

Dalam hal penerimaan BLT Kecamatan Batu merupakan wilayah yang paling luas diantara kecamatan yang lain dan juga jumlah masyarakat yang cukup banyak 98.921 jiwa atau 45% dari penduduk di Kota Batu (Badan Pusat Statistik Kota Batu,2021). Jumlah penerima BLT pada kecamatan batu sebanyak 2.152 orang yang mana tingkat ketidaksesuaian pada kecamatan ini juga cukup tinggi jika dihitung per desa. Dengan rata-rata tingkat ketidaksesuaian pada Kecamatan Batu sebesar 45%. Jika dibandingkan dengan kecamatan Junrejo hanya sebesar 11,3% ketidaksesuaian penerima BLT. Hal ini berdasarkan hasil pemberitahuan oleh perangkat desa yang menangani bantuan di Kelurahan masing-masing.

Berdasarkan data hasil persentase rata-rata ketidaksesuaian antara Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo, diketahui bahwa angka persentase ketidaksesuaian Kecamatan Junrejo lebih kecil dibandingkan angka persentase ketidaksesuaian Kecamatan Batu. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Junrejo lebih tinggi tingkat kesesuaian penerima BLT dibandingkan Kecamatan Batu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kecil angka persentase ketidaksesuaian penerima BLT suatu daerah, maka semakin besar angka persentase kesesuaian penerima BLT suatu daerah.

Besar angka kesesuaian penerima BLT Kecamatan Junrejo dapat diketahui dari analisis data pada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Junrejo. Kecamatan Junrejo memiliki memiliki tujuh Desa atau Kelurahan, yakni Desa Beji, Pendem, Mojorejo, Torongrejo, Tlekung, Junrejo dan Dadaprejo. Pada Desa Beji terdapat 10% dari 324 penerima bantuan langsung tunai yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung tunai, pada Desa Pendem terdapat 12% dari 352 penerima bantuan langsung tunai yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan, Desa Mojorejo sebanyak 9% dari 231 penerima bantuan langsung tunai yang tidak sesuai, Desa Torongrejo terdapat sebanyak 15% dari 637 penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria, pada Desa Tlekung terdapat 10% dari 351 penerima bantuan langsung tunai yang tidak sesuai, Desa Junrejo Terdapat 8% dari 297 penerima bantuan langsung tunai, sedangkan pada Desa Dadaprejo hanya sebesar 4% dari 249 penerima bantuan sosial yang

tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung tunai. Hasil persentase tersebut berdasarkan pada hasil informasi wawancara kepada perangkat desa pengurus bantuan sosial.

Tabel 1 Persentase Ketidaksesuaian Penerima Bantuan Langsung Tunai

No	Desa	Jumlah Penerima	Ketidak Sesuaian	Total Ketidaksesuaian
1	Beji	324	10%	32
2	Pendem	352	12%	42
3	Mojorejo	231	9%	20
4	Torongrejo	637	15%	95
5	Tlekung	351	10%	35
6	Junrejo	297	8%	24
7	Dadaprejo	249	4%	10

Berdasarkan data diatas Desa Dadaprejo mendapati persentase kesalahan penerima hanya sebesar 4% dari 249 penerima jadi penerima yang tidak sesuai yakni sebanyak 10 orang, sehingga membuat pertanyaan bagaimana peran perangkat desa tersebut melakukan penyesuaian penerima bantuan langsung tunai pada daerahnya.

"Pemberian bantuan langsung tunai dilakukan dengan baik sehingga tujuan dari pemberian bantuan sudah tersampaikan pada masyarakat yang mendapatkan. Bantuan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari" (Wawancara pada 22 Desember 2022)

"Penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mana peraturan itu haruslah dipatuhi masih banyak data-data yang salah membuat daerah tersebut masih banyak masyarakat yang kurang diperhatikan. Data-data penerima

yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi dan situasi. Pemerintah daerah setempat juga harus turun tangan dalam melakukan hal tersebut." (Wawancara pada 21 Desember 2022)

Kesesuaian data merupakan proses dalam pembaruan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Kegiatan pemutakhiran data ini mencakup dalam melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat dan mendata keluarga baru yang memiliki masalah sosial yang dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah melalui observasi dan wawancara kepada keluarga yang layak untuk dibantu (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah,2021).

Kesesuaian data ini digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin yang mana masuk kedalam kriteria miskin pada Permendes Nomor 6 Tahun 2022. Diharapkan dilakukan Kesesuaian ini adalah adanya data yang sesuai dengan kondisi dan masyarakat mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.. (Gunawan Sumodiningrat,2003).

Strategi pemerintahan dalam kesesuaian penerima Bantuan Langsung Tunai ini adalah dengan melakukan pendataan secara cermat dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Melakukan Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan Kerjasama agar bisa menghasilkan data yang sesuai pada ketentuan yang sudah ada. Selain itu, agar Bantuan Langsung Tunai tepat sasaran maka pemerintah perlu

memperbarui (DTKS) secara berkala sebagai acuan penerima Bantuan Langsung Tunai Tepat Sasaran(Rofiq Hidayat,2022).

"Pemerintah daerah harus memiliki strategi dalam pemberian bantuan langsung tunai karena apabila pemerintah daerah hanya menurut pada laporan yang diberikan melainkan pemerintah daerah juga turun langsung agar kesalahan yang terjadi bisa diminimalkan dan penerima bantuan agar sesuai dengan aturan yang ada. Bantuan tersebut bisa dikatakan berhasil apabila tingkat ketidak sesuaian rendah." (Wawancara pada 21 Desember 2022)

Bantuan langsung tunai merupakan pemberian bantuan yang bisa berupa barang atau uang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan pada uraian di atas penulis melakukan penelitian sebagai tugas akhir berupa skripsi dengan judul " **STRATEGI PEMERATAAN DALAM KESESUAIAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN DADAPREJO KOTA BATU**"

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerataan melalui kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusah masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pemerataan melalui kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari strategi pemerataan melalui kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini dilaksanakan adalah:

- a. Bagi pembaca, sebagai salah satu sumber informasi tambahan dalam memperoleh suatu informasi untuk mengidentifikasi penemuan strategi dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai.
- b. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan tambahan dan memberikan pengalaman serta memberikan informasi mengenai kegiatan penelitian.
  - a. Bagi aparatur daerah, mampu menjadikan acuan dalam melaksanakan kinerja aparatur daerah bisa berjalan dengan baik.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam memperoleh sebuah pembahasan yang tersusun secara sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sehingga mampu

menunjukkan hasil penelitian yang tertata dengan baik. Maka penulis mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bagian pertama dalam penelitian bisa disebut sebagai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini mengisi uraian tentang tinjauan Pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka. Penelitian kualitatif ini dirujuk baik dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab ketiga, pada bab selanjutnya menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sebagai identitas penelitian seperti jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan data dan saran dari hasil



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Strategi Pemerataan Melalui Kesesuaian Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Dadaprejo, maka disimpulkan sebagai berikut:

Dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo dapat dilaksanakan atau diselesaikan berdasarkan pada pemerataan pembangunan dengan model *bottom-up* dimana pembuat kebijakan berdasarkan pada lembaga daerah yaitu Kelurahan dan pemerintah pusat hanya mengikuti saja. Selain itu, untuk kesesuaian penerima bantuan otonomi daerah merupakan faktor yang sangat mendukung dimana Kelurahan bisa membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri bisa disebut sebagai dekonsentrasi untuk membantu menyelesaikan kemiskinan yang ada sehingga otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipergunakan untuk desa sebagai lembaga terendah untuk membuat sebuah kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan strategi pemerataan dan otonomi daerah berjalan baik hal tersebut dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Kelurahan Dadaprejo sehingga pada saat ini tingkat kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo sangat baik.

Faktor penghambat dalam Strategi Pemerataan Melalui Kesesuaian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Dadaprejo yaitu, minimnya anggaran BLT sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan merasa tidak puas. Selain itu, adanya kecemburuan masyarakat yang mana sebelumnya mendapatkan bantuan dan kemudian tidak dapat sehingga membuat masyarakat sering mengeluh pada RT/RW ataupun pada pihak Kelurahan secara langsung.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa hal yang disarankan oleh peneliti:

1. Data penerima bantuan langsung tunai pada pemerintah Kota Batu tidak segera diperbarui yang juga bisa menjadi penghambat dalam pemberian bantuan, seharusnya pemerintah Kelurahan Dadaprejo menyampaikan langsung kepada Pemerintah Kota untuk segera memperbarui data penerima bantuan setidaknya satu tahun sekali melalui surat tertulis. Apabila melalui surat tertulis tidak ada tanggapan maka Pemerintah Daerah harus datang langsung ke Pemerintah Kota untuk segera memperbarui data.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan adanya data penerima bantuan yang belum diperbarui oleh pemerintah pusat untuk bantuan langsung tunai yang menghambat jalanya pemberian bantuan. Hal

ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mencari satu permasalahan yang ada di pemerintahan Kota Batu.

3. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di lapangan terdapat temuan baru yakni adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pengusaha lokal daerah tersebut. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian di Kelurahan Dadaprejo.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2014. Akuntansi Pemerintahan Daerah. .Bandung : Alfabeta.

Abdulah Yusuf. 2022. Pengertian Kajian Teori

Abu Huraerah. *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, 2013.

Diakses 15 februari 2023.

Aeni Rahma . 2022. Bantuan Langsung Tunai dan Kesejahteraan Masyarakat. Diakses Pada 19 Oktober 2022

Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers

Andi Arifuddin, 2019 <https://gopos.id/9-kriteria-kemiskinan-menurut-kemensos/>

Chambers, Robert, (1983). Rural Development, Putting the Last First, Longman: London

Chamsyah B. 2008. Reinventing Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Trisakti University Press.

Desa Petualan Indah . 2021. Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Devita Swanta .2021. Memahami 11 Metode yang Digunakan untuk menilai kinerja karyawan. (<https://m.brilio.net/creator/memahami-11-metode-yang-digunakan-untuk-menilai-kinerja-karyawan-c69c24.html>). Diakses Pada 19 Oktober 2022

Dinas Kim Tawil, 2001 .Survey Kampung Sendiri Dinas Kabupaten Bandung

Dinas Sosial Kota Batu. 2021 (<https://dinsos.batukota.go.id/>). Diakses pada 22 Desember 2022

Disperkimta. 2018. Kemiskinan. (<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-tentang-kemiskinan-92.>). Diakses pada 30 November 2022

Hakim, A.R. 2005. Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Wilayah Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah).

Dinamika Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS, Vol.1, No.1.

- Hanura Siti. 2015. Otonomi Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Haryono, Dedi. 2003. "Perencanaan Bersama Masyarakat", Makalah dalam
- Herdiana, Dian, et al. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan." *Jurnal Inspirasi* 12.1 (2021): 1-16.
- Hidayat Rofiq. 2022. Agar BLT Tepat Sasaran, Pemerintah Perlu Memperbarui DTKS Berkala. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/agar-blt-tepat-sasaran--pemerintah-perlu-memperbaharui-dtks-berkala-lt6316c50f6542e/>), Diakses Pada 22 Desember 2022
- Hikmat, Harry, (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humaniora Bandung.
- Hikmat, Harry. 2001. Strategy Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Iqbal Hasbi . 2008. Implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. ([http://eprints.undip.ac.id/17533/1/HASBI\\_IQBAL.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17533/1/HASBI_IQBAL.pdf)). Diakses Pada 19 Oktober 2022
- Jarnasy, Owin. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Blantika. Jakarta. 2004.
- Jawa Pos. 2018. Data Warga Miskin Malang Dinyatakan Tidak Valid. (<https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2018/data-warga-miskin-di-malang-diklaim-tidak-valid/>). Diakses Pada 22 Desember 2022
- Jayaputra, A. (2014). Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya Berbasis Institusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
- Karuru, P. (2013). Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1-9.



Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP)

Kominfo. 2018. Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat. ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr)). Diakses Pada 4 Januari 2023

KPPN Ketapang. 2020. Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya. (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>). Diakses Pada 22 Desember 2022

Kurnianto Kris . 2018 . Konsep Kinerja Secara Umum

LinovHR .2022. Indikator Apa Saja yang Digunakan Untuk Penilaian Kinerja Karyawan?

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi

Mas'ued, M. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.1997.

Nasikun. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2001.

Oktrivina S Alifia. 2022. Penilaian Kinerja Karyawan : Definisi, Matrik, dan Metode-metodenya. (<https://glints.com/id/lowongan/penilaian-kinerja-karyawan/#.Y1A BzU>). Diakses Pada 19 Oktober 2022

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pratama, Yoghi Citra. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia." (2014).

Prawiro Muhamad . 2020 . Pengertian Kinerja : Indikator dan faktor yang mempengaruhi kinerja. (<https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-kinerja.html>) . Diakses Pada 19 Oktober 2022

Rahmat, P. S. (2009). Penelitian kualitatif. Equilibrium, 5(9), 1-8.

rangka Sosialisasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif, DPP



- Sampoerna University. 2022. Kerangka Berpikir: pengertian, macam, dan cara membuatnya. (<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/contoh-kerangka-berpikir/>). Diakses pada 4 Januari 2022
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).
- Septiani Maya. 2020 . Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik. (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>). Diakses Pada 17 Oktober 2022
- Setkab. 2017. Memacu Infrastruktur, Mempercepat Pemerataan Pembangunan.
- Setyaningrum Dyah. 2017 . Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi .([https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=-joS-9cAAAAJ&citation\\_for\\_view=-joS-9cAAAAJ:5nxA0vEk-isC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-joS-9cAAAAJ&citation_for_view=-joS-9cAAAAJ:5nxA0vEk-isC)). Diakses Pada 17 Oktober 2022
- Siagian, P. Sondahg. 2005. Fungsi-Fungsi Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sidabutar Butar. 2022. Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Membantu Kepemilikan Administrasi Kependudukan Di Desa Bonian, Kecamatan Silima Pungga Provinsi Sumatera Utara. Diakses Pada 22 Desember 2022
- Sugartoto, Agus Dodi. 2003. Perencanaan Pembangunan Partisipatif. IPGI. Solo.
- Suharto, E. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sumatra, Norma Hanifah. Hubungan Aktivitas Fisik Sehari-hari Dengan Derajat Hipertensi Pada Lansia Di Kota Batu. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.



Sumodiningrat, Gunawan, (1999). Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial,

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.

Supriatna, (1997). Kemiskinan : Teori, Fakta dan kebijakan, impac Edisi

Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan

Syaukani, H.R. 2003. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah.. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Wibowo, Edi. "Perencanaan dan strategi pembangunan di Indonesia." Jurnal Ekonomi Dan  
Kewirausahaan 8.1 (2008).

Wrihatnolo, Randy R, dkk. 2002. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar  
dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. PT.Elex Media  
Komputindo. Yogyakarta: Andi.

